



## Kasus Korupsi KTT-E Gianyar Segera Sidang

DENPASAR, NusaBali

Kejaksaan Negeri (Kejari) Gianyar melimpahkan dua tersangka kasus dugaan korupsi dana Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KTT-E) Gianyar, yaitu I Ketut Ludri dan I Made Astika alias Genep, selaku Ketua dan Bendahara Kelompok Tani Ternak Suar Sari di Banjar Penyabangan, Desa Kerta, Kecamatan Payangan, Gianyar.

Pelimpahan ini sendiri dilakukan langsung oleh Kasipidsus Kejari Gianyar, Herdian Rahardi pada, Kamis (15/10) ke Pengadilan Negeri (PN) Denpasar untuk selanjutnya disidangkan di Pengadilan Tipikor Denpasar. Herdian mengatakan setelah pelimpahan ini, pihaknya tinggal menunggu penunjukan majelis hakim dan jadwal persidangan. "Sudah resmi kami limpahkan dan sekarang tinggal menunggu jadwal sidang," ujar Herdian.

Kedua tersangka ini sudah menghuni Rutan Gianyar setelah Polres Gianyar melimpahkan kasus ini ke Kejari Gianyar pada, Rabu (30/9) lalu. Kasus dugaan korupsi itu terungkap saat tersangka I Ketut Ludri (Bendahara kelompok) dan I Made Astika alias Genep (Ketua kelompok) mengajukan proposal Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KTT-E) periode 27 Mei 2010 sampai dengan 27 Mei 2012 dengan tujuan untuk mengembangkan sapi dengan jumlah 50 anggota.

Pengajuan kredit dilakukan melalui Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Payangan akhirnya dicairkan sebesar Rp 998.650.000. Kemudian kedua tersangka tersebut kembali mengajukan permohonan kredit untuk kedua kalinya yakni pada periode 29 Mei 2012 sampai 29 Mei 2014 dengan anggota 45 orang. Kemudian kredit disetujui sebesar 1.125.000.000. Setelah dilakukan pemeriksaan ternyata pada saat pengajuan kredit mencantumkan anggota fiktif serta tandatangan anggota palsu. "Akibat korupsi ini negara dirugikan Rp 245 juta," pungkas Herdian.

Kedua tersangka dijerat pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18, subsider pasal 3 Jo pasal 18 subsider pasal 8 Jo pasal 18, lebih subsider lagi pada pasal 9 Jo pasal 18 Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang Pembrantasan tindak pidana Korupsi yang telah diubah dengan UU RI no 20 tahun 2001, tentang perubahan atas UU No 31 tahun 1999 tentang pembrantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 Jo pasal 64 ayat (1) KUHP. rez

Edisi : Jumat, 16 Oktober 2015

Hal : 5



# Ternyata Banyak Aset di Badung Belum Bersertifikat

MANGUPURA, NusaBali

Pendataan aset milik pemerintah terus dilakukan Bagian Aset dan Bagian Administrasi Pemerintahan Umum (APU) Setda Badung. Pendataan juga menggandeng Badan Pertanahan Nasional (BPN). Diketahui bahwa masih banyak aset milik pemerintah yang belum mempunyai sertifikat resmi.

Dari data yang dihimpun, terdapat 494 aset yang dimiliki Pemkab Badung saat ini. Terdiri dari lahan dan bangunan. Kurang lebih aset-aset ini bernilai Rp 5,9 triliun. Akan tetapi dari pendataan tersebut baru sekitar 346 aset yang bersertifikat, 148 lainnya diketahui belum

digunakan masyarakat. "Belum lagi kita diminta menyajikan data laporan keuangan dengan neraca berbasis akrual," jelasnya.

Laporan keuangan berbasis akrual ini nanti untuk sekaligus sebagai bahan penilaian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Menurut mantan Camat Kuta Selatan itu, bila tidak dilaporkan dengan menggunakan neraca berbasis akrual, maka Badung bisa kena opini Disclaimer dari BPK RI.

Meski begitu, pihaknya berharap pendataan aset milik pemerintah daerah bisa lebih maksimal lagi. Sehingga dari sisa yang belum bersertifikat, dapat segera memiliki sertifikat. "Mu-

Surapati, Denpasar seluas 967 meter persegi, lima bekas rumah dinas di Jalan Gurita, Denpasar seluas 1.420 meter persegi, bekas gedung DPRD di Jalan Melati, Denpasar seluas 2.397 meter persegi dan Gedung Wanita Karya Graha di Jalan A. Yani, Denpasar seluas 3.191 meter persegi.

Sedangkan untuk gedung sekolah, sudah melakukan pensertifikatan sebanyak 194 Sekolah Dasar (SD) dari 248 SD yang ada. Sementara 52 SD lainnya masih dalam proses. "Untuk pensertifikatan gedung sekolah terbentur karena sebagian diketahui adalah tanah ayahan desa, sehingga perlu dikoordinasikan lagi," tandasnya. as



Wayan Puja

Kabag Aset Setda Badung, Wayan Puja mengatakan, hingga saat ini pihaknya masih melakukan penyisiran barang-barang atau aset pemerintah yang masih

dah-mudahan pengelolaan barang kita makin tertib," harap Puja.

Untuk nilai aset sesuai 494 aset yang telah terdata, Puja memperkirakan nilainya Rp 5,9 triliun. "Tapi ini belum termasuk aset penyerahan fasum (fasilitas umum) dan fasos (fasilitas sosial) serta tanah di bawah jalan," imbuhnya.

Pada bagian lain, Kabag APU Setda Badung, IGN Dwipayana mengungkapkan, dari 346 bidang lahan yang telah disertifikatkan, beberapa diantaranya sudah dihibahkan ke pihak Provinsi Bali. Seperti Tanah Subak Penet, Desa Cemagi, Mengwi seluas 6.475 meter persegi, bekas Kantor Dinas Catatan Sipil di Jalan

Edisi : Jumat, 16 Oktober 2015

Hal : 2



• NUSABALI/SUGIANTO

### **Vandalisme pada Bangunan Mangkrak**

AKSI vandalisme merambah bangunan mangkrak di jalur Denpasar – Singaraja via Bedugul, tepatnya Desa/ Kecamatan Baturiti, Tabanan. Bangunan di atas lahan Pemprov Bali ini sedianya dijadikan pasar induk sayur mayur di Kecamatan Baturiti. Bangunan megah ini didirikan di masa kepemimpinan N Adi Wiryatama. Namun hingga belasan tahun, bangunan ini tak dimanfaatkan sehingga mangkrak dan rusak. Bahkan ada kesan bangunan menghabiskan dana miliaran rupiah ini dihuni hantu.

Edisi : Jumat, 16 Oktober 2015

Hal : 7